

PORTOFOLIO
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Dosen Pengampu :
1. Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.
2. Dr. Mega Metalia, S.E. M.Si., M.S.Ak. Ak. C.A.
3. Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Disusun oleh kelompok 1:

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. Sinthia Wardani | 2313031063 |
| 2. Ika Rahmadhani | 2313031072 |
| 3. M. Wildan Ghani | 2353031002 |

PROGRAM S-1 PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

ANALISIS ARTIKEL

ANALISIS ARTIKEL 1

a. Identitas Artikel

1.	Nama Artikel	Jurnal Artikel Universitas Negeri Padang
2.	Judul	Pengaruh Ketaatan Pada Perundang-Undangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi
3.	Nama Penulis	Husnul Mubaraq
4.	Halaman	1 – 19
5.	Tahun Terbit	2017

b. Abstrak Abstrak

dalam jurnal ini disajikan dalam bahasa Indonesia. Pada bagian abstrak dijelaskan mengenai masalah-masalah pemerintah tidak pedulinya terhadap perbaikan kinerja yang efektif, penelitian terdahulu, latar belakang peneliti memilih masalah, dan tujuan penelitian yang bermanfaat dalam berbagai sektor.

c. Pendahuluan

Dalam bagian pendahuluan, penulis menjelaskan bahwa pemerintah harus dapat melaporkan keberhasilan yang telah dicapai dan berani mengungkapkan kegagalan yang terjadi berkaitan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang lebih tinggi. Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena semakin banyaknya instansi pemerintah kelihatan tidak peduli terhadap upaya perbaikan kinerja yang lebih efisien karena masih banyaknya kinerja instansi pemerintah yang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Keadaan tersebut menimbulkan semakin meningkatnya tuntutan yang diajukan masyarakat kepada pemerintah atas pelayanan publik yang lebih baik.

d. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh ketaatan pada peraturan perundang-undangan, pengaruh pemanfaatan teknologi informasi

dan pengaruh kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bukittinggi.

e. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kausatif atau tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat dengan dua variable atau lebih. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah metode angket atau menyebarluaskan dafatar pertanyaan (kuesioner).

f. Hasil dan Pembahasan

1. Terdapat pengaruh antara variabel sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini diketahui dari hasil uji t yang t hitung $4,895 > t$ tabel $2,007$ dan nilai sig perhitungan $0,000 < 0,05$.
2. Berdasarkan tabel 20 diketahui bahwa koefisien β pemanfaatan teknologi informasi bernilai positif sebesar $0,180$ dan nilai signifikansi $0,169 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa ketatanurut tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 ditolak.
3. Kompetensi aparatur pemerintah bernilai sebesar $0,390$ dan nilai signifikansi $0,028 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima.

g. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ketatanurut pada peraturan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh, dan kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif.

h. Kelebihan dan Kekurangan

Dalam artikel pendahuluan dan pemebahasan dijelaskan secara rinci serta lengkap. Sebaiknya peneliti menambahkan abstrak di bagian awal yang tujuannya untuk memudahkan pembaca terkait gambaran artikel ini.

i. Daftar Pustaka

Mubaraq, Husnul. 2017. Pengaruh Ketatanurut Pada Perundang-Undangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas

Konerja Instansi Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi. Universitas Negeri Padang, hlm 1 - 19.

ANALISIS ARTIKEL 2

a. Identitas Artikel

1.	Nama Artikel	Jurnal Artikel Akutansi dan Pendidikan
2.	Judul	Perkembangan Penelitian Akutansi Sektor Publik Di Indonesia
3.	Nama Penulis	Harumi Puspa Rizky & Doddy Setiawan
4.	Halaman	94-116
5.	Volume/No/ Tahun Terbit	Vol.8/No.2/Okttober 2019
6.	e-ISSN	2477-4995

b. Abstrak

Abstrak dalam jurnal ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada bagian abstrak dijelaskan mengenai tujuan penelitian terkait perkembangan penelitian akutansi sektor publik di Indonesia, subjek penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Kata Kunci: Akuntansi sektor publik, *Charting the field*, dan Penelitian akuntansi.

c. Pendahuluan

Dalam pendahuluannya, penulis menjelaskan bahwa akutansi sektor publik sering mengalami perubahan dari sistem tradisional hingga *New Public Management* (NPM). Hal ini merupakan tindak lanjut dari peraturan pemerintah mengenai otonomi daerah di mana daerah diberi wewenang untuk menjalankan dan mengurus urusan pemerintah serta pelayanan masyarakat sesuai undang-undang yang berlaku. Beberapa tahun belakangan ini penelitian mengenai akuntansi sektor publik mulai menarik perhatian banyak pihak. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya penelitian di sektor publik pada jurnal-jurnal terakreditasi di Indonesia. Penelitian mengenai akuntansi sektor publik telah banyak diteliti di Indonesia maupun di Luar negri.

d. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode “charting the field” yang dikembangkan oleh Hesford et al. (2007). Pada penelitian ini, peneliti memilih

beberapa hasil penelitian mengenai akuntansi sektor publik yang diterbitkan di 22 jurnal terakreditasi per Maret 2019, kemudian mengidentifikasi berdasarkan topik dan metode. Jurnal yang terpilih merupakan jurnal terakreditasi pada sinta 2 per Maret tahun 2019 dengan kata kunci akuntansi, bisnis, dan business

e. Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis 137 artikel yang membahas mengenai akuntansi sektor publik dan diterbitkan pada 22 jurnal terakreditasi di Indonesia dan diklasifikasikan berdasarkan topik dan metode selama 9 tahun mulai tahun 2010-2018. Mayoritas penelitian mengenai akuntansi sektor publik ini diterbitkan di Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL). Topik yang paling banyak dibahas pada penelitian akuntansi sektor publik pada 22 jurnal terakreditasi adalah topik mengenai akuntansi keuangan yaitu pengungkapan laporan keuangan, akuntabilitas kinerja, dan flypaper effect. Sementara itu topik yang masih jarang diteliti adalah sistem akuntansi sektor publik dan perpajakan. Pada 22 jurnal yang diteliti selama tahun 2010-2018 metode penelitian yang paling sering digunakan adalah kuantitatif dengan persentase 70% sementara metode kualitatif sebesar 28%. Metode yang paling sering digunakan adalah survei dan archival yang mempunyai persentase masingmasing 34% dan 32%. Pada penelitian ini diketahui bahwa eksperimen masih sangat jarang digunakan oleh peneliti, oleh karena itu ini hal ini dapat menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan metode eksperimen

f. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil yang dijelaskan bahwa dari tabel-tabel yang telah ditampilkan pada pembahasan, diketahui bahwa masih banyak topik dalam akuntansi sektor publik yang masih jarang diteliti, padahal topik tersebut dapat menjadi hal yang menarik.

g. Kelebihan dan Kekurangan

Informasi yang disampaikan penulis dalam artikel ini sudah dijelaskan secara mendetai sehingga pembaca lebih paham terkait permasalahan pada penelitian ini. Namun, peneliti tidak menyampaikan tujuan dari penelitian ini.

h. Daftar Pustaka

Rizky, Harumi Puspa, & Doddy Setiawan. 2019. Perkembangan Penelitian Akutansi Sektor Publik Di Indonesia. *Jurnal Akutansi dan Pendidikan*, 8 (2), hlm 94-116.

ANALISIS ARTIKEL 3

a. Identitas Artikel

1.	Nama Artikel	Artikel Jurnal Akutansi STIE MDP
2.	Judul	Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akutansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Dispensa Prov, Dispensa Kota, dan Dishub Prov)
3.	Nama Penulis	Intan Permata Haska Wina & Siti Khairani
4.	Halaman	1 – 15
5.	Tahun Terbit	2017

b. Abstrak Abstrak

Dalam jurnal ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada bagian abstrak dijelaskan mengenai tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana studi kasus dalam penelitian ini yaitu di Dispensa Kota, Dispensa Prov dan Dishub Prov. Lalu dijelaskan pula terkait sempel dan teknik pengambilan sempel yang digunakan. Dan peneliti juga menyampaikan hasil dari penelitian yang telah dibuktikan dengan perhitungan. Kata Kunci: Standar Pelaporan, Kualitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas

c. Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan penulis menjelaskan bahwa setiap negara menginginkan pemerintahan yang dapat berupaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Good Governance. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah serta pengawasan yang optimal dari pihak internal maupun pihak eksternal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal. Berdasarkan

d. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kausal atau pendekatan yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/keuangan yang bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Dan Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Nonprobability sampling*

e. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dari tabel uji parsial diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki nilai thitung > ttabel ($2,326 > 2,037$) dan signifikansi $< 0,05$ ($0,027 < 0,05$) Maka Ho ditolak, artinya Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik secara Parsial berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan, variabel X2 memiliki nilai thitung > t tabel ($4,946 > 2,037$) dan signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) Maka Ho ditolak, artinya Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh secara Parsial dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan berdasarkan tabel 6 hasil uji simultan menunjukkan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

f. Kesimpulan dan Saran

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan apabila kinerja akuntabilitas instansi pemerintah menyajikan laporan keuangan sesuai standar pelaporan akuntansi sektor publik, lalu dibarengi dengan pengawasan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak eksternal dan pihak internal yang dilakukan secara independensi, maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

g. Kelebihan dan Kekurangan

Dalam artikel ini peneliti telah mejelasakan materi dengan singkat, jelas serta menyampaikan table hasil perhitungan. Namun, terdapat kekurang yaitu tidak menyampaikan bagian tujuan si peneliti dalam meneliti permasalahan ini.

h. Daftar Pustaka

Wina, Indah Permata, & Siti Khairani. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi STIE MDP*, hal 1-15.

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Pemerintah Aceh bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menyetujui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan perbaikan manajemen pemerintahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan menganut prinsip anggaran berbasis kinerja.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Aceh telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memenuhi ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 189, 190, 191, 192 dan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Pasal 274, Pemerintah Aceh menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh berperan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Menilai kondisi Kas, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan 2023 yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Menggambarkan ikhtisar sumber dana, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Aceh serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2023, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

PEMERINTAH ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
Pendapatan Aceh					
Pendapatan Asli Aceh	5.1.1.1.	2.853.177.437.034,00	2.987.188.692.203,88	104,70	2.917.145.003.051,96
Pendapatan Pajak Aceh	5.1.1.1.1.	1.789.594.976.388,00	1.791.227.845.430,00	100,09	1.717.834.522.320,10
Pendapatan Retribusi Aceh	5.1.1.1.2.	14.277.225.253,00	16.462.009.498,00	115,30	15.000.911.792,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	5.1.1.1.3.	252.723.801.693,00	252.723.801.692,83	100,00	179.862.545.155,53
Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	5.1.1.1.4.	796.581.433.700,00	926.775.035.583,05	116,34	1.004.447.023.784,33
Pendapatan Transfer	5.1.1.2.	7.512.362.697.472,00	7.580.381.361.583,00	100,91	10.775.168.990.686,00
Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	5.1.1.2.	3.541.913.988.472,00	3.609.932.652.583,00	101,92	3.183.288.821.686,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.	394.572.348.472,00	486.170.016.772,00	123,21	275.867.239.481,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.2.	2.015.956.282.000,00	2.015.956.282.000,00	100,00	1.941.752.249.876,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.3.	351.422.817.000,00	338.647.055.747,00	96,36	271.052.797.947,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.4.	779.962.741.000,00	769.159.298.064,00	98,61	694.616.534.382,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.1.1.2.	3.970.448.709.000,00	3.970.448.709.000,00	100,00	7.591.880.169.000,00
Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.1.	3.960.000.000.000,00	3.960.000.000.000,00	100,00	7.560.000.000.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.2.	-	-	-	31.880.169.000,00
Insentif Fiskal	5.1.1.2.3.	10.448.709.000,00	10.448.709.000,00	100,00	-
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	5.1.1.3.	3.581.362.000,00	4.922.849.868,91	137,46	21.270.709.858,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1.	3.581.362.000,00	4.922.849.868,91	137,46	21.164.409.858,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2.	-	-	-	106.300.000,00
Jumlah Pendapatan		10.369.121.496.506,00	10.572.492.903.655,79	101,96	13.713.584.703.595,96
Belanja Aceh					
Belanja Operasi	5.1.2.1.	8.094.074.034.684,00	7.920.985.964.478,68	97,86	9.853.395.736.247,38
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.	2.810.065.283.684,00	2.777.232.840.075,00	98,83	2.672.636.562.974,99
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2.	4.000.024.822.724,00	4.023.048.182.624,39	100,58	5.961.654.335.729,95
Belanja Subsidi	5.1.2.1.3.	18.247.410.999,00	18.244.902.500,00	99,99	13.225.283.500,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4.	914.818.537.702,00	909.872.227.035,29	99,46	1.026.826.661.463,44
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5.	350.917.979.595,00	192.587.812.244,00	54,88	179.052.892.579,00
Belanja Modal	5.1.2.2.	1.740.133.476.500,00	1.676.030.003.504,35	96,32	2.868.705.757.385,01
Belanja Tanah	5.1.2.2.1.	8.601.718.486,00	7.431.814.316,00	86,40	45.923.196.963,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2.	494.578.526.515,00	485.458.694.474,00	98,16	345.149.313.314,57
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3.	534.194.790.197,00	519.361.756.751,21	97,22	827.643.754.161,76
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4.	562.993.054.711,00	551.432.860.935,14	97,95	1.519.021.873.142,68
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5.	139.765.386.591,00	112.344.877.028,00	80,38	130.967.619.803,00
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.	29.261.478.010,00	34.500.000,00	0,12	4.335.030.000,00
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1.	29.261.478.010,00	34.500.000,00	0,12	4.335.030.000,00
Jumlah Belanja		9.863.468.989.194,00	9.597.050.467.983,03	97,30	12.726.436.523.632,39

Uraian	Ref	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
Transfer	5.1.2.4.	1.757.750.109.762,00	1.757.750.109.762,00	100,00	3.046.642.198.413,24
Bagi Hasil Pendapatan	5.1.2.4.1.	892.314.580.120,00	892.314.580.120,00	100,00	764.976.522.258,91
Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	5.1.2.4.1.	892.314.580.120,00	892.314.580.120,00	100,00	764.976.522.258,91
Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2.	865.435.529.642,00	865.435.529.642,00	100,00	2.281.665.676.154,33
Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.2.4.2.	748.652.113.642,00	748.652.113.642,00	100,00	
Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.2.4.2.	116.783.416.000,00	116.783.416.000,00	100,00	220.096.671.415,00
Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	5.1.2.4.2.	-	-	-	2.061.569.004.739,33
Jumlah Belanja Dan Belanja Transfer		11.621.219.098.956,00	11.354.800.577.745,03	97,71	15.773.078.722.045,63
Surplus/Defisit	5.1.3.	(1.252.097.602.450,00)	(782.307.674.089,24)	62,48	(2.059.494.018.449,67)
Pembentukan					
Penerimaan Pembentukan	5.1.4.	1.304.678.718.450,00	1.305.536.023.919,09	100,07	3.934.600.250.977,39
Penggunaan Sisa Lebih Pembentukan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.	1.304.678.718.450,00	1.304.607.179.450,03	99,99	3.933.596.612.390,39
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.	-	928.844.469,06	-	1.003.638.587,00
Pengeluaran Pembentukan	5.1.4.	52.581.116.000,00	49.932.431.588,25	94,96	570.427.514.077,69
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.	52.000.000.000,00	49.351.316.198,95	94,91	50.427.514.077,69
Penyertaan Modal/Investasi	5.1.4.	-	-	-	520.000.000.000,00
Pemerintah Aceh					
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	5.1.4.	581.116.000,00	581.115.389,30	100,00	-
Pembentukan Netto	5.1.4.	1.252.097.602.450,00	1.255.603.592.330,84	100,28	3.364.172.736.899,70
Sisa Lebih Pembentukan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	5.1.5.		473.295.918.241,60	-	1.304.678.718.450,03

Sumber Gambar : Laporan Keuangan Pemerintah Aceh

Berikut ini merupakan ringkasan dari tabel di atas mengenai laporan realisasi anggaran provinsi Aceh 2023 sebagai berikut:

- a. Pendapatan : Rp 10.572.492.903.655,79
- b. Belanja dan Transfer : Rp 11.354.800.577.745,03
- Defisit : Rp 782.307.674.089,24
- c. Pembentukan

 - Penerimaan : Rp 1.305.536.023.919,09
 - Pengeluaran : Rp 49.932.431.588,25

- d. Pembentukan Netto : Rp 1.255.603.592.330,84

Berdasarkan data laporan realisasi anggaran pada tahun 2023 Provinsi Aceh mengalami defisit di bagian belanja dan transfer sebesar Rp 782.307.674.089,24 atau 62,48%. Untuk pembentukan mengalami surplus sebesar Rp 1.255.603.592.330,84 atau (100,28%).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Menggambarkan perubahan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2023 dengan periode sebelumnya. Dengan realisasi sebagai berikut:

PEMERINTAH ACEH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1.	1.304.678.718.450,03	3.933.680.612.390,39
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan	5.2.2.	1.304.607.179.450,03	3.933.596.612.390,39
Pembentukan Tahun berjalan			
Subtotal		71.539.000,00	84.000.000,00
Sisa Lebih / Kurang Pembentukan Anggaran (SiLPA / SiKPA)	5.2.3.	473.295.918.241,60	1.304.678.718.450,03
Subtotal		473.367.457.241,60	1.304.762.718.450,03
Koreksi Kesalahan Pembentukan Tahun Sebelumnya	5.2.4.	(71.539.000,00)	(84.000.000,00)
Lain-lain			
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5.	473.295.918.241,60	1.304.678.718.450,03

Sumber Gambar : Laporan Keuangan Pemerintah Aceh

Berikut ini merupakan ringkasan dari tabel di atas mengenai laporan perubahan saldo lebih provinsi Aceh 2023 dan 2022 sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal : Rp 1.304.678.718.450,03
- b. Sisa Lebih Anggaran (SILPA) : Rp 473.295.918.241,60
- c. Saldo Anggaran Akhir : Rp 473.295.918.241,60

Berdasarkan data di atas provinsi Aceh pada akhir periode tahun 2023 memiliki saldo anggaran lebih sebesar Rp 473.295.918.241,60.

3. Neraca

Menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Aceh mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

PEMERINTAH ACEH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Aceh	5.3.1.1.	396.396.186.019,05	1.168.230.318.850,91
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.2.	1.177.711.672,01	891.867.239,31
Kas di Bendahara BLUD	5.3.1.3.	75.696.236.366,54	135.341.613.867,81
Kas di BOS	5.3.1.4.	203.884.184,00	143.379.492,00
Kas Lainnya	5.3.1.5.	801.836.819,00	71.539.000,00
Kas		474.275.855.060,60	1.304.678.718.450,03
Piutang Pajak	5.3.1.6.	43.184.107.177,00	42.490.918.229,00
Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.7.	(1.147.529.116,58)	(1.176.038.376,86)
Piutang Pajak Netto		42.036.578.060,42	41.314.879.852,14
Piutang Retribusi	5.3.1.8.	593.692.460,33	833.261.304,00
Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.9.	(61.488.395,64)	(21.551.574,54)
Piutang Retribusi Netto		532.204.064,69	811.709.729,46
Piutang Lain-lain PAA yang Sah	5.3.1.10.	174.672.732.346,00	152.324.063.109,85
Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah	5.3.1.11.	(25.103.111.708,77)	(24.251.274.813,88)
Piutang Lain-lain PAA yang Sah Netto		149.569.620.637,23	128.072.788.295,97
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	5.3.1.12.	8.869.168.610,86	8.869.168.610,86
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	5.3.1.13.	(1.718.374.311,09)	(1.718.374.311,09)
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Netto		7.150.794.299,77	7.150.794.299,77
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.3.1.14.	102.047.557,00	21.115.796.192,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto		102.047.557,00	21.115.796.192,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.15.	56.509.583,08	57.884.934,53
Penyisihan bagian lancar Tagihan penjualan Angsuran	5.3.1.16.	(48.661.575,51)	(48.799.110,66)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		7.848.007,57	9.085.823,87
Belanja Dibayar Dimuka	5.3.1.17.	3.581.215.818,02	4.547.580.828,82
Persediaan	5.3.1.18.	556.146.603.309,67	571.548.406.004,65
JUMLAH ASET LANCAR		1.233.402.766.814,97	2.079.249.759.476,71
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Non permanen			
Investasi Dana Bergulir	5.3.2.1.1.	88.556.681.073,52	88.622.236.048,52
Penyisihan Dana Bergulir	5.3.2.1.2.	(86.556.681.073,52)	(88.622.236.048,52)

Uraian	Ref	2023	2022
Jumlah Investasi Nonpermanen			
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Aceh	5.3.2.2.	2.684.124.948.748,24	2.598.499.040.602,32
Jumlah Investasi Permanen		2.684.124.948.748,24	2.598.499.040.602,32
Jumlah Investasi Jangka Panjang		2.684.124.948.748,24	2.598.499.040.602,32
ASET TETAP			
Tanah	5.3.3.1.	6.991.264.621.559,09	6.926.200.775.612,79
Peralatan dan Mesin	5.3.3.2.	5.364.666.848.658,62	4.924.064.223.948,49
Gedung dan Bangunan	5.3.3.3.	8.572.830.860.479,07	7.979.700.524.270,88
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.3.4.	16.458.413.857.347,50	13.585.012.102.817,80
Aset Tetap Lainnya	5.3.3.5.	1.064.575.207.314,36	984.331.745.324,83
Kontruksi Dalam Pengerjaan	5.3.3.6.	1.519.189.947.244,96	3.659.064.347.309,11
Akumulasi Penyusutan	5.3.3.7.	(15.743.203.754.420,48)	(13.837.197.606.040,33)
Jumlah Aset Tetap		24.227.737.588.183,12	24.221.176.113.243,57
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	5.3.4.	1.403.931.328.766,30	1.354.580.012.567,35
Jumlah Dana Cadangan		1.403.931.328.766,30	1.354.580.012.567,35
Tuntutan Ganti Rugi	5.3.5.1.	25.467.078.307,43	25.559.094.461,43
Tuntutan Ganti Rugi Netto		25.467.078.307,43	25.559.094.461,43
Kerjasama Pemanfaatan	5.3.5.2.	334.069.851.053,00	366.681.236.600,00
Akumulasi Penyusutan Kerjasama Pemanfaatan	5.3.5.3.	(171.121.465.510,43)	(157.428.944.842,41)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		162.948.385.542,57	209.252.291.757,59
Aset Tak Berwujud	5.3.5.4.	73.753.026.217,43	68.921.441.767,43
Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.5.5.	(54.181.022.758,55)	(45.032.331.482,50)
Aset Tak Berwujud Netto		19.572.003.458,88	23.889.110.284,93
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.5.6.	100.427.122.000,00	123.029.603.472,00
Aset Lain-lain	5.3.5.7.	3.152.319.439.976,84	3.466.117.214.166,01
JUMLAH ASET LAINNYA		3.460.734.029.285,72	3.847.847.314.141,96
Properti Investasi	5.3.6.	244.656.528.729,80	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.6.1.	(11.676.175.922,98)	-
Properti Investasi Netto		232.980.352.806,82	-
JUMLAH ASET		33.242.911.014.605,17	34.101.352.240.031,91
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PKF)	5.3.7.1.1.	731.836.819,00	354.013.596,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.7.1.2.	14.330.280.873,02	19.412.290.106,18
Utang Belanja	5.3.7.1.3.	792.255.083.271,37	446.842.466.978,73
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.7.1.4.	127.046.989.183,00	129.372.536.263,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		934.364.190.146,39	595.981.306.943,91

Uraian	Ref	2023	2022
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		934.364.190.146,39	595.981.306.943,91
EKUITAS			
Ekuitas	5.3.8.	32.308.546.824.458,78	33.505.370.933.088,00
JUMLAH EKUITAS		32.308.546.824.458,78	33.505.370.933.088,00
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		33.242.911.014.605,17	34.101.352.240.031,91

Sumber Gambar : Laporan Keuangan Pemerintah Aceh

Berikut ini merupakan ringkasan dari tabel di atas mengenai neraca provinsi Aceh 2023 dan 2022 sebagai berikut:

- a. Aset : Rp 33.242.911.014.605.17
- b. Kewajiban : Rp 934.364.190.146,39
- c. Ekuitas : Rp 32.308.546.824.458,78

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 33.242.911.014.605.17 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp 1.233.402.766.814,97 , Aset Tetap (Neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 24.227.737.588.183,12 dan Aset Lainnya (Neto setelah akumulasi penyusutan/amortisasi) sebesar Rp 3.460.734.029.285,72.. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 934.364.190.146,39 dan Rp 32.308.546.824.458,78.

4. Laporan Operasional

Menggambarkan ikhtisar sumber dana, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan beban selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

PEMERINTAH ACEH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA)					
Pendapatan Pajak Aceh	5.4.1.1.1	1.791.921.034.378,00	1.727.000.805.928,10	64.920.228.449,90	3,76
Pendapatan Retribusi Aceh	5.4.1.1.2	16.359.853.618,74	15.269.778.989,51	1.090.074.629,23	7,14
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	338.349.709.838,75	293.356.818.438,08	44.992.891.400,67	15,34
Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah	5.4.1.1.4	951.202.625.938,04	921.358.675.367,67	29.843.950.570,37	3,24
Jumlah Pendapatan Asli Aceh		3.097.833.223.773,53	2.956.986.078.723,36	140.847.145.050,17	4,76
PENDAPATAN TRANSFER					
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan					
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.4.1.2.1	463.669.582.857,00	436.624.937.621,00	27.044.645.236,00	6,19
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.4.1.2.2	2.015.956.282.000,00	1.947.318.489.876,00	68.637.792.124,00	3,52
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.4.1.2.3	338.647.055.747,00	271.052.797.947,00	67.594.257.800,00	24,94
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.4.1.2.4	769.159.298.064,00	694.544.995.382,00	74.614.302.682,00	10,74
Jumlah Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		3.587.432.218.668,00	3.349.541.220.826,00	237.890.997.842,00	7,10
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	5.4.1.2.5	3.960.000.000.000,00	7.560.000.000.000,00	(3.600.000.000.000,00)	(47,62)
Dana Insentif Daerah (DID)	5.4.1.2.6	-	31.880.169.000,00	(31.880.169.000,00)	(100,00)
Dana Insentif Fiskal	5.4.1.2.7	10.448.709.000,00	-	10.448.709.000,00	-
Jumlah Pemerintah Pusat Lainnya		3.970.448.709.000,00	7.591.880.169.000,00	(3.621.431.460.000,00)	(47,70)
Jumlah Pendapatan Transfer		7.557.880.927.668,00	10.941.421.389.826,00	(3.383.540.462.158,00)	(30,92)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah	5.4.1.3.	165.325.866.657,69	100.440.678.612,00	64.885.188.045,69	64,60
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.4.1.3.	305.189.000,00	106.300.000,00	198.889.000,00	187,10
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		165.631.055.657,69	100.546.978.612,00	65.084.077.045,69	64,73
Jumlah Pendapatan		10.821.345.207.099,22	13.998.954.447.161,36	(3.177.609.240.062,14)	(22,70)
BEBAN OPERASI					
Beban Pegawai	5.4.2.1.	2.766.016.827.516,00	2.770.246.354.722,13	(4.229.527.206,13)	(0,15)
Beban Persediaan	5.4.2.2.	1.371.163.337.451,00	2.618.073.380.403,29	(1.246.910.042.952,29)	(47,63)
Beban Jasa	5.4.2.3.	2.469.286.658.638,15	2.626.511.928.132,07	(157.225.269.493,92)	(5,99)

Uraian	Ref	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
Beban Pemeliharaan	5.4.2.4.	185.205.363.972,21	226.050.118.052,94	(40.844.754.080,73)	(18,07)
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5.	343.450.993.449,00	419.722.401.525,00	(76.271.408.076,00)	(18,17)
Beban Subsidi	5.4.2.6.	18.244.902.500,00	13.225.283.500,00	5.019.619.000,00	37,95
Beban Hibah	5.4.2.7.	927.798.792.595,29	1.037.060.857.693,44	(109.262.065.098,15)	(10,54)
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.8.	192.587.812.244,00	179.052.892.579,00	13.534.919.665,00	7,56
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.9.	1.482.964.782.630,54	1.229.148.393.175,67	253.816.389.454,87	20,65
Beban Penyiahan Piutang	5.4.2.10.	24.910.618.343,57	25.002.578.252,44	(91.959.908,87)	(0,37)
Beban Transfer	5.4.2.11.	1.760.834.152.186,00	3.116.545.922.272,24	(1.355.711.770.086,24)	(43,50)
Beban Lain-lain	5.4.2.12.	73.895.663.864,61	81.955.304.080,98	(8.059.640.216,37)	(9,83)
Beban Tak Terduga	5.4.2.13.	34.500.000,00	4.335.030.000,00	(4.300.530.000,00)	(99,20)
Jumlah Beban Operasi		11.616.394.405.390,37	14.346.930.444.389,20	(2.730.536.038.998,83)	(19,03)
Surplus/Defisit Dari Operasi	5.4.3.	(795.049.198.291,15)	(347.975.997.227,84)	(447.073.201.063,31)	128,48
DEFISIT NON OPERASIONAL					
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	5.4.4.	149.499.203.004,68	69.747.868.830,47	79.751.334.174,21	114,34
Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	5.4.4.	43.700.202,39	204.015.655.221,10	(203.971.955.018,71)	(99,98)
Jumlah Defisit Non Operasional		149.542.903.207,07	273.763.524.051,57	(124.220.620.844,50)	(45,38)
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		(149.542.903.207,07)	(273.763.524.051,57)	124.220.620.844,50	(45,38)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		(944.592.101.498,22)	(621.739.521.279,41)	(322.852.580.218,81)	51,93
SURPLUS/DEFISIT	5.4.5.	(944.592.101.498,22)	(621.739.521.279,41)	(322.852.580.218,81)	51,93

Sumber Gambar : Laporan Keuangan Pemerintah Aceh

Berikut ini merupakan ringkasan dari tabel di atas mengenai Laporan Operasional provinsi Aceh 2023 dan 2022 sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO : Rp 10.821.345.207.099,22
- b. Beban-LO : Rp 11.616.394.405.390,37
- Defisit dari Operasi LO : Rp 795.049.198.291,15
- c. Defisit dari Kegiatan Non Operasional LO : Rp 149.542.903.207,07
- Defisit LO : Rp 944.592.101.498,22

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 10.821.345.207.099,22 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 11.616.394.405.390,37 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 795.049.198.291,15 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp 149.542.903.207,07.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Menggambarkan pergerakan ekuitas Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

PEMERINTAH ACEH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2023	2022
Ekuitas Awal	5.6.1.	33.505.370.933.088,00	31.331.114.695.220,64
Surplus/Defisit-LO	5.6.2.	(944.592.101.498,22)	(621.739.521.279,41)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	5.6.3.	(252.232.007.131,00)	2.795.995.759.146,77
Koreksi/Penyesuaian Kas	5.6.3.1	248.099.999,88	-
Koreksi/Penyesuaian Piutang	5.6.3.2	(73.059.296,00)	50.660.490,34
Koreksi/Penyesuaian Persediaan	5.6.3.3	(2.644.208.492,60)	-
Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	5.6.3.4	(1.136.710.505,94)	16.324.336,00
Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	5.6.3.5	2.065.554.975,00	987.497.051,00
Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	5.6.3.6	246.087.455.583,96	2.840.872.567.651,28
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	5.6.3.7	(549.272.588.038,13)	(97.075.519.807,78)
Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	5.6.3.8	(0,10)	836.425.252,73
Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	5.6.3.9	(4.000.000,00)	
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun Lalu	5.6.3.10	575.942.701,00	(6.898.861.317,93)
Koreksi Utang	5.6.3.11	(14.221.334.303,77)	(3.428.628.991,10)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	5.6.3.12	42.095.348.822,76	46.099.715.766,70
Koreksi Penyisihan Piutang	5.6.3.13	24.047.491.422,94	14.535.578.715,53
Jumlah Ekuitas Akhir	5.6.4.	32.308.546.824.458,78	33.505.370.933.088,00

Sumber Gambar : Laporan Keuangan Pemerintah Aceh

Berikut ini merupakan ringkasan dari tabel di atas mengenai Laporan Perubahan Ekuitas provinsi Aceh 2023 dan 2022 sebagai berikut:

- a. Ekuitas Awal : Rp 33.505.370.933.088,00
- b. Surplus/Defisit LO : Rp (944.592.101.498,22)
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : Rp (252.232.007.131,00)
- d. Jumlah Ekuitas Akhir : Rp 32.308.546.824.458,78

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp 33.505.370.933.088,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp

944.592.101.498,22 dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp32.308.546.824.458,78

ANALISIS JURNAL NASIONAL

1.	Nama Jurnal	TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan
2.	Judul Jurnal	<i>LITERATURE REVIEW: ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DAN UPAYA PENCEGAHAN KECURANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK</i>
3.	Penulis	Rahma Putri Wijayanti, Supanji Setyawan
4.	Halaman	11 Halaman
5.	Tahun Terbit	2023
6.	Tempat	Universitas Tidar

Link Jurnal: <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i1.334>

1. Tujuan Penelitian

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal sebagai upaya untuk mencegah kecurangan akuntansi di sektor publik. Penulis melakukan tinjauan pustaka untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dalam mencegah kecurangan.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penulis menganalisis 13 artikel relevan yang membahas hubungan antara pengendalian internal dan kecurangan akuntansi.

3. Temuan Utama

- Efektivitas Pengendalian Internal: Jurnal ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal yang baik dapat mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi di organisasi sektor publik.
- Komponen Pengendalian Internal: Terdapat lima komponen utama dalam sistem pengendalian internal yang perlu diterapkan untuk mencegah kecurangan, termasuk lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
- Faktor Penyebab Kecurangan: Kecurangan akuntansi sering kali muncul karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi dari individu atau kelompok.

4. Kesimpulan

Penelitian menyimpulkan bahwa pengendalian internal yang efektif sangat penting untuk mencegah kecurangan akuntansi. Organisasi sektor publik disarankan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal dan melatih karyawan untuk meminimalkan risiko kecurangan.

5. Saran

Penulis merekomendasikan agar seluruh organisasi sektor publik meningkatkan pengendalian internal dan menjaga standar tinggi dalam implementasinya. Pelatihan karyawan juga dianggap penting untuk meningkatkan kompetensi dan kesadaran akan pentingnya pengendalian internal.

6. Relevansi dan Kontribusi

Jurnal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur mengenai akuntansi dan pengendalian internal, terutama dalam konteks sektor publik di Indonesia. Temuan ini relevan bagi para praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya mencegah kecurangan di sektor publik.

7. Keterbatasan

Meskipun penelitian ini mendalam, keterbatasan dalam hal cakupan literatur dan metode yang digunakan dapat mempengaruhi generalisasi hasil. Penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif mungkin diperlukan untuk memperkuat temuan ini. Dengan demikian, jurnal ini memberikan wawasan berharga tentang pentingnya pengendalian internal dalam pencegahan kecurangan akuntansi di sektor publik.

1.	Nama Jurnal	Jurnal Inovasi Global
2.	Judul Jurnal	Akuntansi Sektor Publik di Indonesia
3.	Penulis	Sudrajat Martadinata
4.	Halaman	5 halaman
5.	Tahun Terbit	2024
6	Tempat	Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

Link Jurnal : <https://jig.rivierapublishing.id/index.php/rv/index>

1. Tujuan Penelitian

Jurnal ini bertujuan untuk memahami perkembangan dan kondisi akuntansi sektor publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali fenomena yang kompleks dan kontekstual di bidang akuntansi publik.

2. Metode Penelitian

- Pendekatan Kualitatif: Metode ini dipilih untuk mendalami aspek-aspek yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.
- Studi Literatur: Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis artikel-artikel ilmiah terkait akuntansi sektor publik, menggunakan alat bantu typeset.io untuk menyusun kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

- Dinamika Akuntansi Sektor Publik: Jurnal menyatakan bahwa akuntansi sektor publik di Indonesia sangat dinamis, dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah dan tuntutan masyarakat.
- Tantangan: Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, dan resistensi terhadap perubahan.
- Reformasi Akuntansi: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meskipun hasil penerapannya bervariasi.

4. Kesimpulan

Jurnal ini menyimpulkan bahwa meskipun akuntansi sektor publik di Indonesia telah mengalami banyak perubahan, tantangan tetap ada. Kerjasama antara akademisi dan praktisi diperlukan untuk menciptakan keselarasan antara konsep dan implementasi akuntansi publik.

5. Kata Kunci

- Akuntansi
- Sektor Publik
- Kinerja Organisasi
- Studi Literatur

6. Relevansi

Jurnal ini relevan bagi akademisi, praktisi akuntansi, dan pembuat kebijakan yang tertarik pada pengelolaan keuangan publik dan perkembangan akuntansi di Indonesia.

7. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang mengkaji penerapan akuntansi sektor publik dari perspektif budaya dan untuk mengeksplorasi solusi terhadap tantangan yang dihadapi. Analisis ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai fokus dan temuan utama dari jurnal tersebut, serta relevansinya dalam konteks akuntansi sektor publik di Indonesia.

1.	Nama Jurnal	Jurnal Penelitian : <i>All Fields of Science</i>
2.	Judul Jurnal	Pentingnya Akuntansi Sektor Publik di Institusi Pemerintahan
3.	Penulis	Alistraja Dison Silalahi dan Marihot Maullang
4.	Halaman	8 Halaman
5.	Tahun Terbit	2023
6.	Tempat	Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Link Jurnal : : <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/index>

1. Tujuan Penelitian

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami pentingnya penerapan akuntansi sektor publik dalam lembaga pemerintah, dengan fokus pada upaya untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan kinerja yang baik.

2. Metode Penelitian

- Metode Deskriptif dan Kualitatif: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menguraikan dan menganalisis data, serta pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai praktik akuntansi di sektor publik.
- Analisis Data: Menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, penelitian ini mengeksplorasi berbagai sumber untuk mendapatkan hasil yang komprehensif.

3. Hasil dan Pembahasan

- Pentingnya Akuntansi Sektor Publik: Penelitian menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik sangat penting untuk memberikan akuntabilitas kepada masyarakat. Sistem akuntansi yang baik dapat menyederhanakan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan penerapan akuntansi yang tepat, lembaga pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penipuan, sehingga menciptakan kepercayaan publik.
- Hambatan dalam Implementasi: Terdapat beberapa tantangan dalam penerapan akuntansi sektor publik, seperti kurangnya objektivitas, konsistensi, dan akurasi dalam

pelaporan keuangan. Penelitian ini juga mencatat bahwa faktor ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan untuk menyajikan laporan yang tepat waktu dan relevan.

4. Kesimpulan

Jurnal ini menyimpulkan bahwa setiap lembaga pemerintah harus menerapkan akuntansi sektor publik untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini juga menekankan perlunya pengembangan standar akuntansi yang lebih baik untuk mendukung praktik akuntansi yang efektif di sektor publik.

5. Kata Kunci

- Akuntansi Publik
- Pemerintahan
- Akuntabilitas

6. Relevansi

Jurnal ini relevan bagi akademisi, praktisi akuntansi, dan pembuat kebijakan yang tertarik pada pengelolaan keuangan publik dan akuntabilitas di lembaga pemerintah.

7. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi penerapan akuntansi sektor publik di daerah tertentu dan menganalisis dampaknya terhadap kinerja lembaga pemerintah. Analisis ini memberikan gambaran menyeluruh tentang fokus, metode, dan temuan utama dari jurnal tersebut, serta relevansinya dalam konteks akuntansi sektor publik di Indonesia.

ANALISIS JURNAL INTERNASIONAL

1	Nama Jurnal	Amkop Management Accounting Review (AMAR)
2	Judul Jurnal	Accountability and Transparency in Public Sector Accounting: A Systematic Review
3	Penulis	Ratna Sari dan Muslim Muslim
4	Halaman	17 Halaman
5	Tahun terbit	2023
6	Tempat	Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan, 90231, Indonesia

Link Jurnal :

https://www.researchgate.net/publication/382847087_Accountability_and_Transparency_in_Public_Sector_Accounting_A_Systematic_Review

Tujuan: Jurnal ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis mekanisme yang mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam akuntansi sektor publik. Fokus penelitian mencakup kerangka regulasi, praktik audit, transformasi digital, keterlibatan pemangku kepentingan, dan pertimbangan etis.

Metode: Penelitian ini menggunakan desain tinjauan sistematis dengan mengikuti pedoman PRISMA. Pencarian literatur mencakup artikel jurnal yang telah melalui peer-review, buku, dan laporan resmi dari tahun 2000 hingga 2023. Data dianalisis menggunakan sintesis kualitatif dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan celah dalam literatur yang ada.

Temuan Utama

- Peran Kerangka Regulasi:** Standar seperti IPSAS dan GFS sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Adopsi IPSAS dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan transparansi di sektor publik.
- Praktik Audit:** Audit eksternal dan internal memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga keandalan informasi keuangan. Audit eksternal membantu mempertahankan kepercayaan publik, sementara audit internal memberikan pengawasan berkelanjutan untuk meningkatkan integritas operasional.

3. **Transformasi Digital:** Inisiatif e-government seperti pelaporan keuangan online dan portal data terbuka meningkatkan aksesibilitas dan transparansi informasi keuangan. Namun, tantangan seperti keamanan data dan literasi digital masih harus diatasi.
4. **Keterlibatan Pemangku Kepentingan:** Mekanisme keterlibatan pemangku kepentingan, seperti anggaran partisipatif dan konsultasi publik, sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas. Keterlibatan ini memastikan bahwa laporan keuangan relevan dan responsif terhadap kebutuhan publik.
5. **Pertimbangan Etis dan Pencegahan Korupsi:** Standar etis yang kuat dan kebijakan anti-korupsi yang komprehensif diperlukan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Perlindungan bagi pelapor sangat penting untuk mendorong pelaporan praktik tidak etis.

Kesimpulan

Jurnal ini menekankan pentingnya pendekatan multifaset untuk meningkatkan manajemen keuangan sektor publik. Pembuat kebijakan harus memprioritaskan adopsi standar internasional, berinvestasi dalam infrastruktur digital, dan mendorong perilaku etis melalui pendidikan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi inisiatif dukungan yang disesuaikan dan dampak teknologi baru terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Rekomendasi

- **Penerapan Standar Internasional:** Negara perlu mengadopsi kerangka dan standar internasional untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- **Investasi dalam Infrastruktur Digital:** Meningkatkan infrastruktur digital untuk mendukung pelaporan keuangan yang transparan.
- **Pendidikan dan Pelatihan:** Menyediakan program pendidikan untuk meningkatkan literasi digital dan pemahaman etis di kalangan pemangku kepentingan.

Analisis ini menunjukkan pentingnya penelitian lebih lanjut untuk menjembatani celah antara teori dan praktik dalam akuntansi sektor publik, serta untuk memahami cara-cara baru dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

1.	Nama Jurnal	
2.	Judul Jurnal	APPLIED PUBLIC SECTOR ACCOUNTING FOR

		BROADBAND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT WITH PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP SCHEME: A LITERATURE REVIEW
3.	Penulis	Steelyana W, Evi
4.	Halaman	17 Halaman
5.	Tahun Terbit	2021
6.	Tempat	BINUS University Jalan KH Syahdan No.9, Jakarta Barat

Link Jurnal :

https://www.researchgate.net/publication/360549160_APPLIED_PUBLIC_SECTOR_ACCOUNTING_FOR_BROADBAND_INFRASTRUCTURE_DEVELOPMENT_WITH_PUBLIC_PRIVATE_PARTNERSHIP_SCHEME_A_LITERATURE_REVIEW

1. Judul dan Tujuan Penelitian

Jurnal ini membahas penerapan akuntansi sektor publik dalam pengembangan infrastruktur broadband melalui skema Kemitraan Publik-Swasta (Public Private Partnership/PPP). Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi tema utama dalam penelitian akuntansi sektor publik terkait PPP untuk infrastruktur broadband selama 20 tahun terakhir (2000-2020) dan menganalisis kontribusinya terhadap pengembangan infrastruktur broadband.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur sistematis. Data yang digunakan diambil dari publikasi jurnal internasional terakreditasi selama periode yang ditentukan. Proses pemilihan artikel dilakukan secara ketat untuk mengurangi bias dan memastikan keandalan hasil.

3. Temuan Utama

- **Tema Utama:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa tema utama dalam literatur PPP untuk pengembangan infrastruktur broadband adalah **Strategi Kebijakan Publik**. Ini menunjukkan pentingnya kebijakan pemerintah dalam mendorong investasi swasta dan pengembangan infrastruktur.

- **Kualitas Jurnal:** Sebagian besar artikel yang dianalisis berasal dari jurnal berkualitas tinggi (Q1) dan mencakup tema-tema seperti kebijakan publik, manajemen, dan teknologi.
- **Tren Penelitian:** Penelitian menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dalam publikasi mengenai PPP dan infrastruktur broadband, dengan fokus pada strategi kebijakan dan implementasi.

4. Implikasi

Jurnal ini memberikan wawasan penting mengenai bagaimana PPP dapat digunakan untuk meningkatkan akses broadband, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Kebijakan publik yang mendukung pendanaan dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dari jurnal ini menekankan bahwa untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur broadband, diperlukan strategi kebijakan yang efektif yang dapat memfasilitasi kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi aspek tata kelola dan akuntabilitas dalam konteks PPP untuk infrastruktur broadband.

Penutup

Jurnal ini memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman tentang peran PPP dalam pengembangan infrastruktur broadband dan pentingnya strategi kebijakan publik dalam mendorong investasi dan aksesibilitas layanan.